

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

-----, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1998.

Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, Raja Grafindo, 2011.

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Hendra Budiman, *Kesaksian Edisi II*, Jurnal LPSK, Jakarta, 2016.

L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan Organized Crime*, Bandung, Alumni, 2015.

-----, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.

Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Jakarta, CV.Datacom, 1996.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta, 2012.

- O.C. Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2006.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter R. Sen dalam Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Phillipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*, Bogor, Politiea, 1980.
- Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990.
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Suhandi Cahaya dan Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Perlindungan Justice collaborator di Indonesia: Perbandingan di Amerika dan Eropa*, Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, Volume 1 No. 1, 2011.

B. SUMBER LAIN

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

2. Jurnal Elektronik

Abdul Haris Semendawai, “*Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia*”, makalah disampaikan pada *International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, Juli 2011.

Dutch Code of Criminal Procedure

Dutch Criminal Code Act of 3 March 1881

J.H. Crijns, *Internastional Seminar and Focus Group Discussion on The Protection of Whistleblowers as Justice Collaborators–Witness Agreements in Dutch Criminal Law*, Jakarta 2011

Loyens & Loeff, *Publication Anti-Corruption 2018*, diakses pada tanggal 22 juli 2018, 21.45 WIB.

Nixson, “*Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Universitas Sumatera Utara Law Journal Vol. II-No.2, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, November 2013.

<http://eviana19.blogspot.com>, *Perilaku Menyimpang*, di akses pada tanggal 22 Mei 2018, pkl. 20.12 WIB.

<https://www.int-comp.org/insight/2016/july/12/corruption-perception-and-reality-in-the-netherlands/>, diakses pada tanggal 22 juli 2018, pkl. 20.33 WIB.

J.H. Crijns, *Internastional Seminar and Focus Group Discussion on The Protection of Whistleblowers as Justice Collaborators–Witness Agreements in Dutch Criminal Law*, Juli 2011.

Mas Achmad Santosa, *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator)*, makalah disampaikan pada *international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator*, Jakarta, 2011.

Recommendation Rec(2005)9 of the Committee of Ministers, to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice, Adopted by the Committee of Ministers on 20 April 2005 at the 924th meeting of the Ministers’ Deputies.

United Nations Convention against Corruption, General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003.